



PEMANTAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DI DAERAH PERBATASAN

Oksep Adhayanto¹, Heni Widiyani², Irman³, Pery Rehendra Sucipta⁴, Lia Nuraini⁵, Endri⁶, Irwandi Syahputra⁷, Achmad Ardiansyah⁸, Amru Reza⁹, Dian Mustika¹⁰, Norman Edi¹¹, Zulhamsyah Putra¹², Ischika Aprilia Ivana¹³, Urip Hardiyanto¹⁴

^{1,2,3,4,5,6,7}Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

^{8,9,10,11}Prodi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

^{8,9,10}Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: adhayantooksep@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 23-05-2022

Accepted: 24-05-2022

Published: 27-06-2022

Kata Kunci:

Ideologi; Pancasila;
Daerah Perbatasan

Keyword:

Ideology; Pancasila;
Border Area

Abstrak:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda didaerah perbatasan ini dilakukan dalam upaya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila secara lebih luas lagi kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat mampu menahan laju pengaruh ideologi dari luar.

Abstract:

Community service activities in the form of consulting Pancasila's values for the young generation in the border area are carried out in an effort to bring Pancasila's values to the community more widely. Only then can we expect to be able to withstand the speed of ideological influences from the outside.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang ideologi akan senantiasa menghadapi kompleksitas permasalahan yang terus berkembang. Hal ini mengingat masalah ideologi sudah muncul dan banyak dibicarakan sejak abad 18, yang ditandai dengan lahirnya gerakan Renaissance (Hasibuan & Sulistyono, 2018). Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai memerlukan ideologi (Suryatni, 2014).

Kata ideologi baru muncul pada revolusi Perancis. Pada waktu itu 'les ideologues' merupakan sebutan bagi sekelompok intelektual yang menginginkan masyarakat Perancis menjadi masyarakat yang rasional dan ilmiah, yang mereka usahakan melalui rancangan sistem pendidikan nasional. Paham mereka dipelopori oleh filsuf Destutt de Tracy melalui konsep tentang 'science of ideas', yang menyatakan bahwa ilmu mempunyai tujuan menolak pemikiran metafisik dan melenyapkan prasangka dari pikiran manusia, agar manusia siap menggunakan penalaran yang rasional (Sutikna, 2016).

Terlepas dari berbagai ragam definisi ideologi, menurut Koento Wibisono (1989) (dalam Surajiyo, 2020) apabila diteliti dengan cermat ada kesamaan unsur ideologi yaitu : keyakinan, mitos dan loyalitas. Keyakinan, dalam arti bahwa dalam setiap ideologi selalu memuat gagasan-gagasan vital, konsep-konsep dasarnya yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku atau perbuatan manusia sebagai subyek pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Mitos, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu memitoskan sesuatu ajaran, dan secara optimistik-deterministik mengajarkan, bagaimana suatu ideologi pasti akan dapat dicapai. Loyalitas, dalam arti bahwa dalam setiap ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatan optimal kepada para pendukungnya.

Sebagai landasan idiil bagi Indonesia, Pancasila sungguh menakjubkan. Gagasan politik yang tertuang di dalamnya merupakan rumusan solutif dan sempurna. Para pendiri negara kita mampu meramunya dengan sangat kreatif, mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem, negara sekuler dan negara agama. Tidak bisa kita bayangkan jika dahulu para founding fathers tidak menemukannya, maka mungkin tidak kita jumpai di dunia ini negara bernama Indonesia. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Huda, 2018).

Bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar. Masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain, sehingga bangsa ini secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural (Dewantara, 2018). Salah satu kekhususan negara Indonesia adalah terdiri dari banyak gugusan pulau (Adhayanto, Oksep; Agus Sutikno, Irman, Nurhasanah, 2020). Sebagai dasar Negara (ground norm)-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung didalam Pancasila, menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam (Adhayanto, 2015).

Daerah perbatasan negara merupakan daerah yang sangat berimbang terkait dengan penanaman ideologi negara karena berdekatan dengan negara lainnya. Pengaruh ideologi negara lain tentu sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan itu sendiri. Pengaruh tersebut dapat berwujud dalam tingkahlaku masyarakat seperti lifestyle, education, fashion dan lain sebagainya.

Seiring dengan berjalannya waktu Pancasila terus mendapat ancaman disintergrasi bangsa. Pancasila dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama yang memperhatikan keragaman suku, budaya maupun agama, artinya Pancasila adalah titik temu dari semua perbedaan yang ada di Indonesia. Namun hal ini kembali diuji dengan maraknya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi atas nama agama yang menandakan kemunduran peradaban bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, mudurnya nilai-nilai Pancasila juga tergambar dari hilangnya semangat saling menghargai dan semangat gotong-royong. Belum lagi, bahwa adanya organisasi yang jelas menolak keberadaan Pancasila dan ingin menggantikan dengan ideologi lain. Persoalan tidak hanya muncul dari masyarakat Indonesia sendiri, namun juga dari gelombang globalisasi yang masuk bagaikan angin yang tidak terlihat namun dirasakan. Anak-anak mulai tumbuh dengan kemajuan dan akses teknologi tanpa kontrol, gaya hidup hedonisme, maraknya berita hoax, dan kenakalan lainnya. Pancasila sebagai way of life tidak lagi, menjadi panutan meskipun negara Indonesia (Situru, 2019). Globalisasi memiliki tanggung jawab atas tergerusnya nilai-nilai moral dan karakter, hal ini merupakan ancaman yang serius dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak (Budiarto, 2020).

Sebagai masyarakat yang majemuk, masyarakat Indonesia juga rentan terhadap konflik berbasis etnis. Di dalam sejarahnya, bangsa Indonesia juga pernah mengalami berbagai macam pengiring konflik, baik rasial maupun non-rasial. Konflik antar suku, agama, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kondisi ini tentu saja tidak bisa diabaikan dan terjadi terus menerus (Adhayanto et al., 2021). Berdasarkan kondisi diatas, perlu dilakukan sebuah kegiatan guna meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila bagi generasi muda yang ada di daerah perbatasan dengan judul "Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila di Daerah Perbatasan".

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Maret 2022 dengan menghadirkan narasumber akademisi Bapak Marsudi, S.Sos.,M.Si dan Bapak William Hendri SH.,MH. Peserta yang hadir ± 100 orang yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan mahasiswa lainnya.



Gambar 1. Flyer Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesi pertama, disampaikan oleh pembicara bapak William Hendri SH.,MH dengan mengangkat tema “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah Perbatasan”. Pembicara pertama ini melihat tantangan masyarakat perbatasan dilihat dari aspek kehidupan antara lain:

1. Aspek geografis
Kebutuhan jalan penghubung, landasan pacu, dan sarana komunikasi yang memadai untuk keperluan pembangunan wilayah perbatasan antar negara.
2. Aspek demografis
Pengisian dan pemerataan penduduk untuk keperluan sistem hankamrata termasuk kekuatan cadangan melalui kegiatan transmigrasi dan pemukiman kembali penduduk setempat.
3. Aspek sumber daya alam
Survei dan pemetaan sumber daya alam guna menunjang pembangunan dan sebagai objek yang perlu dilindungi pelestarian dan keamanannya.
4. Aspek ideologi
Pembinaan dan penghayatan ideologi yang mantap untuk menangkal ideologi asing yang masuk dari negara tetangga.
5. Aspek politik
Pemahaman sistem politik nasional, terselenggaranya aparat pemerintahan yang berkualitas sebagai Mitra aparat hankam dalam pembinaan teritorial setempat.
6. Aspek ekonomi
Pembangunan kesatuan wilayah ekonomi yang dapat berfungsi sebagai penyangga wilayah sekitarnya.
7. Aspek sosial-budaya
Peningkatan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan yang memadai untuk mengurangi kerawanan di bidang keamanan, serta nilai sosial budaya setempat yang tangguh terhadap penetrasi budaya asing.
8. Aspek hankam
Pembangunan pos-pos perbatasan, pembentukan sabuk pengamanan, dan pembentukan kekuatan pembinaan teritorial yang memadai, serta perangkat komando dan pengendalian yang mencukupi.

Menurut narasumber ini, nilai strategis wilayah perbatasan antara lain: 1). Daerah perbatasan sangat berpengaruh dalam mempertahankan kedaulatan negara, 2). Daerah perbatasan adalah faktor pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya, 3). Daerah perbatasan memiliki keterkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan wilayah tersebut yang satu

sama lain saling mempengaruhi baik antar wilayah maupun antar negara dan 4). Daerah perbatasan memiliki pengaruh terhadap kondisi dan situasi pertahanan dan keamanan wilayah baik dalam skala regional maupun skala nasional

Dengan strategisnya wilayah perbatasan sebagaimana disebut diatas, menurut narasumber ancaman fatual diwilayah perbatasan antara lain: (1) Ancaman terhadap konflik di wilayah perbatasan dan keamanan pulau-pulau kecil terluar, (2) Ancaman separatisme, (3) Terorisme, (4) Bencana alam, (5) Konflik horizontal, (6) Radikalisme dan (7) Kelangkaan energi dan ragam kegiatan illegal baik di darat maupun di laut yang membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Untuk itu, yang perlu dilakukan guna memperkuat nilai-nilai Pancasila di daerah perbatasan antara lain adalah:

1. Memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila
2. Membangun kekuatan nir militer
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat perbatasan
4. Memperkuat identitas bangsa di mulai dari masyarakat perbatasan negeri.

Selanjutnya, narasumber kedua mengangkat tema “Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila di Perbatasan”. Menurut Marsudi, permasalahan yang kompleks di daerah perbatasan antara lain:

1. Geografis Jauh
2. Infrastruktur tidak memadai
3. Transportasi Sulit
4. Kebutuhan serba kurang
5. Berpotensi menggunakan Mata uang luar; dan
6. Nonton Berita dan Drama LN.

Selanjutnya tantangan yang dihadapi dalam upaya pemantapan nilai-nilai pancasila di daerah perbatasan antara lain: a) Banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau; b) Efektifitas dan Daya tarik pembelajaran pancasila; c) Politisasi Identitas dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA; d) Pengaruh kedekatan negara sekitar dan e) Ketimpangan Kemajuan Pembangunan Lebih lanjut dijelaskan oleh pembicara pertama ini terkait dengan upaya pemantapan nilai-nilai pancasila di daerah perbatasan adalah:

1. Membumikan nilai-nilai Pancasila
2. Memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik
3. Pendidikan pancasila dengan penekanan pada teori dan praktik
4. Menanamkan kesadaran potensi bahasa dari luar
5. Mempertahankan identitas Bangsa
6. Menjadikan Perbatasan sebagai halaman depan
7. Meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan rasa adil



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Narasumber

SIMPULAN

Penguatan terhadap ideologi Pancasila khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah perbatasan perlu dilakukan secara berkesinambungan. Besarnya pengaruh ideologi luar sangat dirasa bagi masyarakat perbatasan. Berbagai aktivitas masyarakat yang sedikit banyak dipengaruhi oleh ideologi luar tercermin dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat sudah semestinya bersatu padu dalam rangka memperkuat nilai-nilai Pancasila ditengah-tengah masyarakat

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Kepulauan Riau atas kerjasamanya sehingga terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Oksep; Agus Sutikno, Irman, Nurhasanah, S. (2020). The Archipelago Regional Government Policy Reformulation in Indonesia. *AASIC*, March, 481–487. <http://aasic.org/proc/aasic/article/view/520>
- Adhayanto, O. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 4. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3599>
- Adhayanto, O., Rahmawati, N., Haryanti, D., Suwardi, N., Pambudi, R., & Mada. (2021). The Strategy of Strengthening Pancasila Ideology In The Digital Age. *Pancasila And Law Review*, 2(2), 99–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/plr.v2i2.2396>
- Budiarto, G. (2020). Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter. *Pamator Journal*, 13(1), 50–56. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6912>
- Dewantara, A. (2018). Pancasila dan Multikulturalisme Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica*, 15(2), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.35312/spet.v15i2.53>
- Hasibuan, A. S., & Sulistyono, D. (2018). Peranan ideologi dalam integrasi nasional. *Kebijakan Pemerintah*, 1, 1–10. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1093/633>
- Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. *Resolusi*, 1(1), 78–99.
- Situru, R. S. (2019). Pancasila dan Tantangan Masa Kini. *Elementary Jurnal*, 2(1), 34–41. <http://www.journals.ukitoraja.ac.id/index.php/ej/article/view/611>
- Surajiyo. (2020). Keunggulan Dan Ketangguhan Ideologi Pancasila. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(58), 145–155.
- Suryatni, L. (2014). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1), 34–47. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.101>
- Sutikna, N. (2016). Ideologi Manusia Menurut Erich Fromm (Perpaduan Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Kritik Sosial Karl Marx). *Jurnal Filsafat*, 18(2), 205–222. <https://doi.org/10.22146/jf.3525>